

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KOTA DUMAI

RENCANA KERJA TAHUN 2024

(PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 51 TAHUN 2023)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

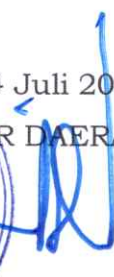
KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai dalam rangka mendukung pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya Misi Keempat "*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*".

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 14 Juli 2023
INSPEKTUR DAERAH,

Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003





WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II

KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai tahun 2024;
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

- (4) Penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 26 SERI E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR TAHUN 2023	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	47
3.3 Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
54	
BAB V PENUTUP	
63	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah – Inspektorat Daerah Kota Dumai	26
Tabel 2.3	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai	28
Tabel 2.4	Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai	30
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 – Inspektorat Daerah Kota Dumai	38
Tabel 3.1	Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota	46
Tabel 3.2	Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai	48
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Dumai	49
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 – Inspektorat Daerah Kota Dumai	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
----------	--	---



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I
BAB I

PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I

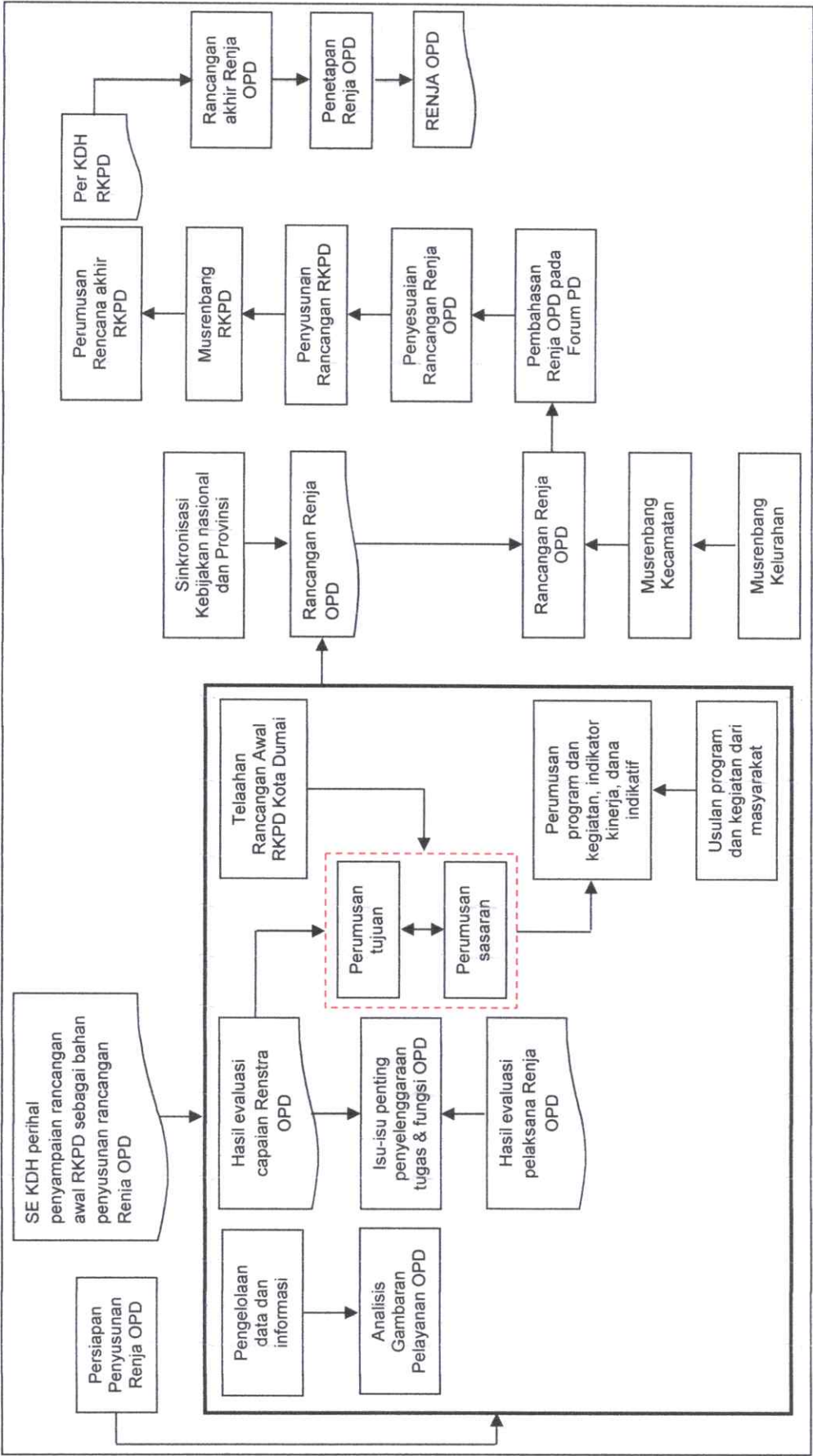
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan merupakan serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Proses/tahapan penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan penyusunan Renja meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu penyusunan rancangan awal Renja ini juga mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru ini diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja ini mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan

Tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah ini merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga Maret kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi rancangan Renja ini dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda, tujuannya untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda. Rancangan Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum tersebut.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang RKPD. Rancangan akhir Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi selambat-lambatnya selama 2 (dua) minggu dalam rangka menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Walikota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Rancangan akhir Renja yang telah disempurnakan tersebut disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dilakukan setelah menerima Surat Wali Kota Dumai Nomor 050/1489/BAPPEDA tanggal 20 Desember 2021 Hal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan awal renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2023 di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung Kota Dumai. Rancangan awal Renja disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah, selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan kesesuaiannya dengan rancangan awal RKPD. Jika sudah sesuai, maka rancangan awal Renja yang telah disempurnakan tersebut menjadi Rancangan Renja. Selanjutnya rancangan Renja dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Musrenbang RKPD Kota Dumai yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung Kota Dumai. Rancangan Renja

disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Dumai. Rancangan akhir Renja Tahun 2024 disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Jika tidak terdapat saran dan rekomendasi dari hasil verifikasi, maka rancangan akhir Renja ini ditetapkan menjadi Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024. Tahap terakhir, Renja Tahun 2024 dimutakhirkan kembali melalui website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada tanggal 22 Juni 2023.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini mempedomani: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (3) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026; dan (4) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022. Dalam merumuskan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai, dilakukan telaah terhadap Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, juga Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka sinkronisasi program pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional. Renja ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D); dan
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Inspektur Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai ini telah disusun selaras dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, serta keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dengan dokumen RKPD Kota Dumai tahun 2024, Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, Renja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Inspektorat Daerah Kota Dumai, kewenangan Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Inspektorat Daerah Kota Dumai. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
- c. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional;
- d. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
- e. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

- a. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD; dan
- d. Lampirkan tabel T-C.31 review terhadap rancangan awal RKPD tahun n.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Memuat penjelasan tentang:

- a. proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
- c. sajikan tabel T-C.32 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun n.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Bagian ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bagian ini berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
- Tabel T-C.33 rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun n dan prakiraan maju tahun $n+1$.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

Bab ini melampirkan rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 yang disesuaikan dengan rumusan rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa:

- Catatan penting yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dilakukan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Pada Tabel 2.1 tersaji rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Dumai												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2023)			
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6 01		INSPEKTORAT DAERAH										
6 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen		-	-	-	6 Dokumen	1 Dokumen	17%		
6 01 01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0%		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	0%		
6 01 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		
		Jumlah Dokumen RKA Mumi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%		
6 01 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		
		Jumlah Dokumen RKA Pembahasan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		
6 01 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		
		Jumlah Dokumen DPA Mumi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0%		
6 01 01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		
		Jumlah Dokumen DPA Pembahasan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 4 Dokumen		0 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen 0 Dokumen	0%		

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Bulan Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Bulan Kesejahteraan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Laporan		14 OrgBln	14 OrgBln	100%	2 Laporan	14 OrgBln 0 Laporan	100% 0%
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	-	0 Laporan	0%
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		-	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	-	0 Laporan	0%
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terincinya Pengelolaan Aset Dengan Baik Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	50%
6 01 03 2.03 06	Penelausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penelausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	50%
					-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Stel Balu	50 Stel		0 Stel	0 Stel	-	-	0 Stel	0%
6 01 01 2.05	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	940 Orang		-	-	-	235 Orang	35 Orang	4%
6 01 01 2.05	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan kinerja ASN untuk pergi ke kantor	50 paket		0 Stel	0 Stel	-	-	0 Stel	0%
6 01 01 2.05	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket		-	-	-	0 paket	0 paket	0%
6 01 01 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang		0 Orang	0 Orang	-	35 Orang	35 Orang	25%
6 01 01 2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang		0 Orang	0 Orang	-	200 Orang	0 Orang	0%
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Pakai Habis	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
6 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik/Elektronik	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket		-	-	-	2 paket	2 paket	25%
6 01 01 2.06	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Perbulan yang Dipegunakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		-	-	-	1 paket	1 paket	25%
6 01 01 2.06	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket		0 paket	0 paket	-	2 paket	2 paket	25%
6 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Makanan dan Minuman yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket		-	-	-	2 paket	2 paket	25%
6 01 01 2.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor Perbulan yang Dipegunakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Penyediaan barang cetakan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket		-	-	-	2 paket	2 paket	25%
6 01 01 2.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Media Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
6 01 01 2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokument		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
6 01 01 2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Bulan		72 Orang Kali	72 Orang Kali	100%	-	72 Bulan	75%
6 01 01 2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan		-	-	-	30 Laporan	30 Laporan	18%

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	381 unit		-	-	-	38 unit	46 unit	12%
6 01 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit		0 unit	0 unit	-	-	0 unit	0%
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit		-	-	-	1 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor	100 unit		0 unit	0 unit	-	-	0 unit	0%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	220 unit		-	-	-	15 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	20 unit		40 unit	40 unit	100%	-	40 unit	200%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	150 unit		-	-	-	20 unit	6 unit	4%
6 01 01 2.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Kantor	4 unit		0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Kantor	1 LS		0 LS	0 LS	-	-	0 LS	0%
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 unit		-	-	-	0 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	1 LS		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit		0 unit	0 unit	-	1 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit		0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pakian Habis	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	11 Laporan		-	-	-	2 Laporan	217 Laporan	1973%
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Surat Terkirim	12 Bulan		0 Bulan	0 Bulan	-	-	0 Bulan	0%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		-	-	-	0 Laporan	0 Laporan	-
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Perbulan Komunikasi dan Sumber Daya Air	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	25%
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Pelaksanaan Pawai Takbir	2 Kali		0 Kali	0 Kali	-	-	0 Kali	0%

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 2) Jumlah Jasa Keamanan Kantor 3) Jumlah Jasa Sopt Kantor 4) Jumlah Jasa Administrasi Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	216 Orang Bulan 4 Laporan		216 Orang Bulan -	203 Orang Bulan -	94% -	- 1 Laporan	203 Orang Bulan 1 Laporan	94% 25%
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Inspektorat Daerah Kota Dumai Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	12 Bulan 484 unit		12 Bulan -	12 Bulan -	100% -	- 63 unit	12 Bulan 87 unit	100% 18%
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	7 unit 12 unit		7 unit -	7 unit -	100% -	- 3 unit	7 unit 3 unit	100% 25%
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit 42 unit		0 unit -	0 unit -	- -	- 9 unit	0 unit 9 unit	0% 21%
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	12 Bulan 425 unit		12 Bulan -	12 Bulan -	100% -	- 50 unit	12 Bulan 50 unit	100% 12%
6 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Kantor Jumlah Gedung Pemeliharaan/ yang Direhabilitasi	12 Bulan 1 LS		12 Bulan 1 LS	12 Bulan 1 LS	100% 100%	- -	12 Bulan 1 LS	100% 100%
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit		-	-	-	1 unit	0 unit	0%
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	0%
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Perencanaan Penyelenggaraan Pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100% 372 Laporan		100% -	100% -	100% -	- 93 Laporan	100% 93 Laporan	100% 25%

Kode	Usunan/Bidang Usunan Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja/ Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	70 LHP 48 Laporan		56 LHP -	56 LHP -	100% -	- 12 Laporan	56 LHP 12 Laporan	80% 25%
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	144 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	-	36 Laporan	36 Laporan	25%
6 01 02 2.01 03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi dan Evaluasi Dokumen	14 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100%	-	11 Dokumen	79%
		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	168 Laporan		-	-	-	42 Laporan	42 Laporan	25%
6 01 02 2.01 04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Kota Dumai	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	25%
		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	4 Laporan		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	25%
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan BPK RI Penawakan Proporsi Ribu dan Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Pemeriksaan Inspektoral Daerah (APIP)	4 LHA 80%		0 LHA 80%	0 LHA 86%	100%	-	0 LHA 86%	0% 100%
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	8 dokumen		-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	25%
6 01 02 2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan yang Ditindaklanjuti Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80% 74 laporan		80% -	80% -	100% -	- 17 laporan	80% 21 laporan	100% 28%
6 01 02 2.02 01	Pertanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Jumlah Kerugian Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang diangand	80% 4 laporan		0% -	0% -	- -	- 1 laporan	0% 1 laporan	0% 25%
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/ Kasus Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 LHP 70 laporan		4 LHP -	4 LHP -	100% -	- 16 laporan	4 LHP 16 laporan	16% 23%
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%		100%	100%	-	100%	100%	100%
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah APUP yang Berkualitas Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	100% 8 rekomendasi		100% -	100% -	100% -	- 2 rekomendasi	100% 54 rekomendasi	100% 675%

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Penyusunan Kinerja Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Dokumen 4 rekomendasi		1 Dokumen -	1 Dokumen -	100% -	- 1 rekomendasi	1 Dokumen 1 rekomendasi	100% 25%
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	55 Orang Kali 4 rekomendasi		52 Orang Kali -	52 Orang Kali -	100% -	- 1 rekomendasi	52 Orang Kali 1 rekomendasi	95% 25%
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	100% 60 perangkat daerah		100% -	100% -	100% -	- 15 perangkat daerah	100% 15 perangkat daerah	100% 25%
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Unsur Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah		-	-	-	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	25%
6 01 03 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Penilaian Mandiri yang Dilaksanakan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	100% 40 perangkat daerah		100% -	100% -	100% -	- 10 perangkat daerah	100% 10 perangkat daerah	100% 25%
6 01 03 2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Dokumen 3 kegiatan		3 Dokumen -	3 Dokumen -	100% -	- 3 kegiatan	3 Dokumen 3 kegiatan	60% 100%
6 01 03 2.02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Peningkatan Integritas	3 Dokumen 8 perangkat daerah		3 Dokumen -	3 Dokumen -	100% -	- 2 perangkat daerah	3 Dokumen 2 perangkat daerah	100% 25%

Pada Tabel 2.1 diatas khususnya pada kolom 3, dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan yang tertuang di dalam Renja Tahun 2022 dengan Renja Tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap indikator kinerja kegiatan/subkegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini terjadi karena indikator kinerja kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan kinerja mulai tahun 2023 ditetapkan setelah tersusunnya APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pada periodisasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sedangkan tahun 2023 merupakan tahun kedua. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 serta perkiraan realisasi capaian target Renstra s.d. tahun 2023 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa tidak semua subkegiatan yang direncanakan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 untuk dilaksanakan pada tahun 2023 tertuang di dalam Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023, dan tidak semua subkegiatan yang direncanakan pada Renja tahun 2023 tertuang di dalam DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pada periodisasi Renstra Tahun 2021-2026, dan merupakan tahun pertama dilakukannya penyesuaian terhadap indikator subkegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Artinya, pada tahun 2023 seharusnya sudah tercapai 25% dari target akhir yang direncanakan pada Renstra. Pada tahun 2023, beberapa subkegiatan yang diprediksi tidak mencapai target yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka

menengah karena keterbatasan anggaran pada DPA Tahun 2023 diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD; dan
 - 6) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
 - 2) Subkegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; dan
 - 2) Subkegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1) Subkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 2) Subkegiatan pengadaan mebel;
 - 3) Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - 4) Subkegiatan pengadaan aset tak berwujud; dan
 - 5) Subkegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
 - 6) Subkegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 2) Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan
 - 3) Subkegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

- g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Subkegiatan kerja sama pengawasan internal.
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Subkegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Agar subkegiatan-subkegiatan diatas dapat memenuhi target akhir yang direncanakan, perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen perubahan Renstra berikutnya, serta perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua subkegiatan yang direncanakan pada Renja tahun 2023 tertuang di dalam DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023. Namun, seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan berdasarkan DPA Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 diprediksi akan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026. Adapun beberapa subkegiatan yang diprediksi mencapai target yang direncanakan pada tahun 2023 sesuai dengan rencana pada dokumen perencanaan jangka menengah diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) Subkegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ;
 - 4) Subkegiatan bahan logistik kantor;
 - 5) Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; dan
 - 6) Subkegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
 - 2) Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:
 - 1) Subkegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah;
 - 2) Subkegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah;
 - 3) Subkegiatan revidi laporan kinerja;
 - 4) Subkegiatan revidi laporan keuangan; dan
 - 5) Subkegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
 - i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Subkegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah.
 - j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 1) Subkegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan
 - 2) Subkegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.
 - k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
 - 1) Subkegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
 - 2) Subkegiatan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
 - 3) Subkegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
 - 4) Subkegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada tahun 2023 diprediksi tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 karena keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan/subkegiatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa faktor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja pada saat penyusunan dokumen Renstra, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan karena kesalahan dalam menetapkan target kinerja maupun pagu indikatif sebaiknya dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan perubahan dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Level Maturitas SPIP	Level		3	3	3	4	100%	100%	100%	100%	
2.	Level Kapabilitas APIP	Level		3	3	3	4	100%	100%	100%	100%	
3.	Nilai SAKIP OPD	Nilai		A	A	A	A	88%	87%	86%	85%	
4.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI	%		90	95	95	95	96%	91%	90,8%	91,2%	
5.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP	%		90	95	95	95	96%	92%	92%	92%	
6.	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	%		90	100	100	100	0%	0%	0%	0%	
7.	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di Lingkungan Inspektorat Daerah	%		100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Level Maturitas SPIP.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Unsur-unsur SPIP antara lain: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Mekanisme penilaian, terdiri dari:

- a. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2. Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, mencakup unsur-unsur berikut:

- a. SPIP;
 - b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
 - d. Kapabilitas APIP, akan dilakukan penilaian tersendiri.
3. Komponen penilaian, terdiri dari:
- a. Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
 - b. Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
 - c. Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, berdasarkan:
- a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3 (Terdefinisi)” dengan nilai 3,127 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,000 serta skor IEPK sebesar 2,706 dengan rincian skor seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Kota Dumai

Fokus Penilaian	Bobot	Skor
Penetapan Tujuan	40%	1,400
Struktur dan Proses	30%	0,872
Pencapaian Tujuan	30%	0,855
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,127
Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,000
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,706

Realisasi capaian level maturitas SPIP Kota Dumai Tahun 2022 ini sesuai dengan target level maturitas yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan capaian level maturitas SPIP Kota Dumai Tahun 2023 diprediksi sesuai dengan target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3.

b) Level Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Adapun ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

1. Mekanisme Penilaian, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
 - c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komponen Penilaian, terdiri atas:
 - a. Dukungan pengawasan;
 - b. Aktivitas pengawasan; dan
 - c. Kualitas pengawasan.
3. Aspek Penilaian, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Implementasi; dan
 - c. Hasil.
4. Periode Penilaian:
 - a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada “Level 3 atau kategori *Delivered*” dengan skor sebesar 3,31 dari skor maksimal sebesar 5,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Hasil *Quality Assurance* (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau

Elemen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil QA oleh BPKP
Komponen dukungan pengawasan (<i>Enabler</i>)		
Pengelolaan SDM	0,72	0,54
Praktik professional Manajemen SDM	0,72	0,72
Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,24	0,21
Budaya dan hubungan organisasi	0,18	0,18
Struktur tata kelola	0,36	0,36
Komponen aktivitas pengawasan (<i>Delivery</i>) dan kualitas pengawasan (<i>Result</i>)		
Peran dan layanan	1,6	1,30
SIMPULAN ENTITAS	3,82	3,31
LEVEL	Level 3	Level 3

Dari tabel 2.4 diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Provinsi Riau atas hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai, nilai kapabilitas APIP Kota Dumai berada pada level 3. Realisasi capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2022 ini sesuai dengan target level kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%. Sedangkan capaian level kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2023 diprediksi sesuai dengan target yang direncanakan pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu Level 3.

- c) Nilai SAKIP OPD.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna

peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja, meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. revaluasi dan evaluasi kinerja.

Evaluasi SAKIP internal tahun 2022 kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-12.01.III/INSP/2022, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal ini adalah metodologi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dipilih atas pertimbangan kepraktisan, keterbatasan waktu dan ketersediaan SDM evaluator. Secara umum pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja, bobot 30;
- b. pengukuran kinerja, bobot 30;
- c. pelaporan kinerja, bobot 15; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

LKE disusun sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Berdasarkan dokumen/informasi yang dikumpulkan, setiap kriteria yang dinilai pada LKE kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan “*Professional Judgements*” dari evaluator untuk menentukan bobotnya. Hasil pengisian LKE kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Evaluasi SAKIP internal Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster dengan Perangkat Daerah yang dievaluasi pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- 1) Kluster Utama: (1) Dinas Kesehatan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; (6) Dinas Perikanan; (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; (11) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; (12) Satuan Polisi Pamong Praja; (13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (14) Inspektorat Daerah; dan (15) Dinas Perdagangan.
- 2) Kluster Pendukung: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Dinas Tenaga Kerja; (4) Dinas Lingkungan Hidup; (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (7) Dinas Perhubungan; dan (8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3) Kluster Tambahan: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Kec. Dumai Kota; (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; (5) Kec. Dumai Timur; (6) Sekretariat Daerah; (7) Kec. Dumai Barat; (8) Kec. Dumai Selatan; (9) Kec. Bukit Kapur; (10) Badan Pendapatan Daerah; (11) Kec. Sungai Sembilan; (12) RSUD; (13) BKPSDM; dan (14) Kec. Medang Kampai.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Nilai SAKIP OPD” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai adalah 80 dengan Predikat A. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2022, nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 70,79 dengan Predikat BB, adapun nilai SAKIP pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- a. Kluster Utama : 69,42
- b. Kluster Pendukung : 72,36
- c. Kluster Tambahan : 71,36

Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 88%. Sedangkan nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 diprediksi sebesar 72 dengan Predikat BB. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 juga tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 86%.

- d) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK – RI yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK – RI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK-RI” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebanyak 479 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.114 rekomendasi. Dari total 1.114 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 958, sebanyak 135 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 9 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 12 temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%. Sedangkan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 diprediksi sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 juga belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 91%.

e) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2022, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Dearah Kota Dumai adalah sebanyak 2.445 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 4.435 rekomendasi. Dari total 4.435 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 3.819, sebanyak 180 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 436 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2022 adalah sebesar 86%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 96%. Sedangkan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2023 diprediksi sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 87%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 juga belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 92%.

f) Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang diusulkan berpredikat WBK dan WBBM s.d. tahun n}}{\text{Total OPD yang menjadi target berpredikat WBK dan WBBM}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” tahun 2022 pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2022, tidak ada satupun Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM, karena di tahun 2022 Kota Dumai tidak termasuk Kabupaten/Kota yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengusulkan Perangkat Daerah berpredikat WBk dan WBBM. Akan tetapi tetap dilakukan pembinaan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, maka persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2022 adalah sebesar 0%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 0%. Sama halnya dengan

tahun 2022, di tahun 2023 realisasi persentase wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2023 diprediksi sebesar 0%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 0%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan unsur pengawasan diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Belum optimalnya penegakan integritas;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
8. Kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesegera mungkin;
9. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas/strategis;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan; dan
11. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan profesional berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menyelenggarakan 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”*. Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan disiplin ilmu yang beragam, sehingga bisa saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit;
 - d. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh standar audit dan kode etik serta peraturan/kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
 - e. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan;
 - f. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
 - g. Peran APIP semakin dibutuhkan sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja yang dilakukan;
 - h. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta pemutakhiran

program pengawasan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran; dan

- i. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Tantangan

- a. Alokasi sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan objek/entitas yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif;
- b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
- d. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- g. Aktivitas pengawasan oleh APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diarahkan untuk perbaikan GRC termasuk manage risiko dan memastikan pengendalian telah ada, dilaksanakan, dan efektif.
- h. Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
- i. Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah ***“Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan peran dan kapasitas APIP”*** agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan pada rancangan awal RKPD adalah sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) subkegiatan, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) subkegiatan;
2. Pagu indikatif Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023 adalah berjumlah Rp. 20.950.554.036,- berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 24.298.360.182,-, mengalami kenaikan sebesar 16%.

TABEL 2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA DUMAI

Nama Perangkat Daerah : Inspektormt Daerah Kota Dumai											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				20.950.554.036	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				24.298.360.182	
1.	INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	20.950.554.036 17.162.202.524	INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	24.298.360.182 20.110.008.670	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	360.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	460.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan :	35.000.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	13.087.586.824	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	15.125.040.670	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	13.017.586.824	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	15.055.040.670	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35.000.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	231.647.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	300.000.000
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	231.647.700	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	300.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	35 Orang	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	35 Orang	600.000.000
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	400.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	500.000.000
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	996.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.338.000.000
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	50.000.000
1.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	220.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	250.000.000
1.5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	40.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	100.000.000
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	150.000.000
1.5.5	Penyediaan barang celakan dan pengadaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Celakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 paket	150.000.000	Penyediaan barang celakan dan pengadaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Celakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 paket	180.000.000
1.5.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Celakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Celakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Dokumen	8.000.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	600.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	38 unit	1.175.208.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	38 unit	1.375.208.000	
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	125.208.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	125.208.000	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 unit	200.000.000	
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	500.000.000	
1.6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	400.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	400.000.000	
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	2 Laporan	418.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasaan	2 Laporan	418.600.000	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	378.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	378.600.000	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasaan yang dipelihara	59 unit	493.160.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasaan yang dipelihara	59 unit	493.160.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	33.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	33.560.000	
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	249.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	249.600.000	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	60.000.000	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	150.000.000	

No.		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	2.688.351.512	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	2.938.351.512	
2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	108 Laporan	1.970.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	108 Laporan	2.220.000.000	
2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	100.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	100.000.000	
2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	1.000.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	1.250.000.000	
2.1.3 Revu Laporan Kinerja		Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Kinerja	40 Laporan	400.000.000	Revu Laporan Kinerja	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Kinerja	40 Laporan	400.000.000	
2.1.4 Revu Laporan Keuangan		Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	1 Laporan	50.000.000	Revu Laporan Keuangan	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan	1 Laporan	50.000.000	
2.1.5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP		Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 dokumen	420.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 dokumen	420.000.000	
2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	718.351.512	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	718.351.512	
2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kota Dumai	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	380.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	380.000.000	
2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Dumai	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18 laporan	338.351.512	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Dumai	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18 laporan	338.351.512	
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	1.100.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	1.250.000.000	
3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	2 rekomendasi	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	2 rekomendasi	350.000.000	
3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kota Dumai	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	200.000.000	
3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Kota Dumai	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	150.000.000	
3.2 Pendampingan dan Asistensi			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	22 perangkat daerah	800.000.000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	22 perangkat daerah	900.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	
3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	250.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	250.000.000	
3.2.3	Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Dumai	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	300.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Dumai	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	300.000.000	
3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	150.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Dumai	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	250.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD. Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2023 yang disampaikan pada saat Rembuk RT, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat (pokok pikiran DPRD), Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, sampai dengan Musrenbang RKPD di Tingkat Kota tidak ada yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2045. Visi pada RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua” antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

RPJMN 2024-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 penguatan proses transformasi ekonomi menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang ditetapkan diantaranya:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur;
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi;
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan birokrasi;

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Indonesia 2045 menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan RPJMN Tahun 2020-2024 “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024 “*Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional. Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB). Capaian RB di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari persentase Pememerintah Kab/Kota yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi “Baik”, baru mencapai 32,28% sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, perilaku koruptif masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan isu strategis selama 5 (lima) tahun ke depan dari sisi akuntabilitas yaitu data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu percepatan keterpaduan sistem dan melanjutkan *money follow program* sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung terwujudnya sasaran “Penegakan Hukum Nasional yang mantap” dan “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” pada Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
Terkait Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator	Baseline 2018/2019	Target 2024
Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	4,14
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Indeks RB ≥ Baik	11,22	85
	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Skor SAKIP ≥ B	46,85	80

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang direncanakan terkait sasaran yang tersaji pada Tabel 3.1 diantaranya:

1. Penegakan hukum nasional, dengan arah kebijakan penguatan sistem anti korupsi, yang akan diwujudkan melalui strategi berikut:
 - a) Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - b) Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan arah kebijakan Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, yang akan diwujudkan melalui strategi perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, sebagaimana yang tertuang di dalam Bab II subbab 2.3, maka dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*** sekaligus pencapaian Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 khususnya Misi keempat ***“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”***, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirumuskan Tujuan Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu ***“Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah”***, dengan Sasaran ***“Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah”***.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Kesesuaian Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu	<u>Misi-4</u> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	<u>Tujuan PD</u> Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. <u>Indikator:</u> - Level Maturitas SPIP - Level Kapabilitas APIP	<u>Sasaran PD</u> Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. <u>Indikator:</u> - Nilai SAKIP OPD - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP - Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Dumai Tahun 2021-2026, pencapaian SDG’s, serta upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, maka dirumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.3. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Program – 12 (dua belas) Kegiatan – 44 (empat puluh empat) Subkegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 24.298.360.182,- bersumber dari APBD.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Dumai

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	INSPEKTORAT DAERAH			24.238.360.182				25.697.201.038
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	100%	20.110.008.670			100%	18.545.090.196
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	460.000.000			8 Dokumen	550.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	15.125.040.670			2 Laporan	12.468.890.000
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	15.055.040.670	APBD		46 Orang/Bulan	12.318.890.000
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	350.000.000
1	02	03	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	300.000.000	APBD		1 Laporan	350.000.000
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	235 Orang	600.000.000			235 Orang	600.000.000
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	500.000.000	APBD		35 Orang	500.000.000
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100.000.000	APBD		200 Orang	100.000.000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.338.000.000			1 Laporan	1.823.000.000
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	2 paket	50.000.000	APBD		2 paket	75.000.000
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	1 paket	250.000.000	APBD		1 paket	368.000.000

Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.000.000	APBD	2 paket	180.000.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150.000.000	APBD	2 paket	200.000.000
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	180.000.000	APBD	2 paket	200.000.000
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	8.000.000	APBD	1 Dokumen	50.000.000
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	APBD	40 Laporan	750.000.000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	1.375.208.000		86 unit	1.075.208.000
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	125.208.000	APBD	1 unit	125.208.000
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	200.000.000	APBD	45 unit	300.000.000
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	500.000.000	APBD	40 unit	650.000.000
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	400.000.000	APBD	0 unit	-
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150.000.000	APBD	0 unit	-
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	418.600.000		2 Laporan	547.000.000
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	40.000.000	APBD	1 Laporan	100.000.000
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	378.600.000	APBD	1 Laporan	447.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara	59 unit	493.160.000			114 unit	1.130.992.196
1 02 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	33.560.000	APBD		3 unit	150.000.000
1 02 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya	7 unit	249.600.000	APBD		10 unit	401.600.000
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	60.000.000	APBD		100 unit	229.392.196
1 02 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	350.000.000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	2.938.351.512			100%	4.252.110.842
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	108 Laporan	2.220.000.000			93 Laporan	3.052.110.842
6 01 02 2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	727.110.842
6 01 02 2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan	1.250.000.000	APBD		36 Laporan	1.250.000.000
6 01 02 2.01	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	40 Laporan	400.000.000	APBD		42 Laporan	405.000.000
6 01 02 2.01	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	120.000.000
6 01 02 2.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	420.000.000	APBD		2 dokumen	550.000.000
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 laporan	718.351.512			19 laporan	1.200.000.000
6 01 02 2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	380.000.000	APBD		1 laporan	550.000.000

Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18 laporan	338.351.512	APBD	18 laporan	650.000.000
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	1.250.000.000		100%	2.900.000.000
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun	2 rekomendasi	350.000.000		2 rekomendasi	650.000.000
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	200.000.000	APBD	1 rekomendasi	350.000.000
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	150.000.000	APBD	1 rekomendasi	300.000.000
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	22 perangkat daerah	900.000.000		15 perangkat daerah	2.250.000.000
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	APBD	3 perangkat daerah	550.000.000
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	250.000.000	APBD	10 perangkat daerah	500.000.000
6	01	03	2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 kegiatan	300.000.000	APBD	3 kegiatan	600.000.000
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	250.000.000	APBD	2 perangkat daerah	600.000.000



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*” pada, serta mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pada Tabel 4.1 berikut terlampir Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah disesuaikan dengan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 6.01.00.00.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Totok Ukur	Target
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01		INSPEKTORAT DAERAH												
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan				100%		24.298.360.182 20.110.008.670				100%	25.697.201.038 18.545.090.196
6	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					8 Dokumen	460.000.000				8 Dokumen	550.000.000
6	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai				35.000.000	APBD			2 Dokumen	50.000.000
6	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai				35.000.000	APBD			1 Dokumen	50.000.000
6	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai				35.000.000	APBD			1 Dokumen	50.000.000
6	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai				35.000.000	APBD			1 Dokumen	50.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
									Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai		1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
6	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai		1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai		1 Laporan	250.000.000	APBD		1 Laporan	250.000.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah			2 Laporan		15.125.040.670			2 Laporan	12.468.890.000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai		62 Orang/Bulan	15.055.040.670	APBD		46 Orang/Bulan	12.318.890.000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai		1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	75.000.000

Kode			Usuan/Bidang Urusan Pementintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai			1 Laporan	35.000.000	APBD	75.000.000
6	01	01	2.03		Jumlah laporan Inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Laporan		300.000.000		350.000.000
6	01	03	2.03	06	Penalaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penalaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai			1 Laporan	300.000.000	APBD	350.000.000
6	01	01	2.05		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya				235 Orang		600.000.000		600.000.000
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Dumai			35 Orang	500.000.000	APBD	500.000.000
6	01	01	2.05	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai			200 Orang	100.000.000	APBD	100.000.000
6	01	01	2.06		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan		1.338.000.000		1.823.000.000

Kode		Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target
6	01	2.06	01						2 paket	50.000.000	APBD		2 paket
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	02						1 paket	250.000.000	APBD		1 paket
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	03						2 paket	100.000.000	APBD		2 paket
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	04						2 paket	150.000.000	APBD		2 paket
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	05						2 paket	180.000.000	APBD		2 paket
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	06						1 paket	8.000.000	APBD		1 paket
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai							
6	01	2.06	09						40 Laporan	600.000.000	APBD		40 Laporan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai							
6	01	2.07						61 unit		1.375.208.000			86 unit
				Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan pengawasan									
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Ukur	Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Dumai			1 unit	125.208.000	APBD		1 unit	125.208.000
6	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Dumai			28 unit	200.000.000	APBD		45 unit	300.000.000
6	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Dumai			30 unit	500.000.000	APBD		40 unit	650.000.000
6	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Dumai			1 unit	400.000.000	APBD		0 unit	-
6	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Dumai			1 unit	150.000.000	APBD		0 unit	-
6	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan			2 Laporan		418.600.000			2 Laporan	547.000.000
6	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Dumai			1 Laporan	40.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
6	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Dumai			1 Laporan	378.600.000	APBD		1 Laporan	447.000.000

Kode		Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		
							Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur
6 01 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang urusan pengawasan yang dipelihara			59 unit		493.150.000			114 unit	1.130.992.196
6 01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai			1 unit	33.560.000	APBD	3 unit	150.000.000
6 01	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai			7 unit	249.600.000	APBD	10 unit	401.600.000
6 01	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Dumai			50 unit	60.000.000	APBD	100 unit	229.392.196
6 01	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Dumai			1 unit	150.000.000	APBD	1 unit	350.000.000
6 01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan				100%			2.938.351.512		100%	4.252.110.842
6 01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				108 Laporan		2.220.000.000		93 Laporan	3.052.110.842
6 01	02	2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Dumai			5 Laporan	100.000.000	APBD	12 Laporan	727.110.842

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Dumai		60 Laporan	1.250.000.000	APBD		36 Laporan	1.250.000.000
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	Kota Dumai		40 Laporan	400.000.000	APBD		42 Laporan	405.000.000
6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	Kota Dumai		1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	120.000.000
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Dumai		2 Dokumen	420.000.000	APBD		2 Dokumen	550.000.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			19 Laporan		718.351.512			19 Laporan	1.200.000.000
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kewajiban Negara/Daerah		Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Kota Dumai		1 laporan	380.000.000	APBD		1 laporan	550.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Dumai		18 laporan	338.351.512	APBD		18 laporan	650.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			100%		1.250.000.000			100%	2.900.000.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun			2 rekomendasi		350.000.000			2 rekomendasi	650.000.000

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
								Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
6	01	03	2.01	01	Penusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kota Dumai			1 rekomendasi	200.000.000	APBD			1 rekomendasi	350.000.000
6	01	03	2.01	02	Penusunan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan		Kota Dumai			1 rekomendasi	150.000.000	APBD			1 rekomendasi	300.000.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi			22 perangkat daerah		900.000.000				15 perangkat daerah	2.250.000.000
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Dumai			10 perangkat daerah	100.000.000	APBD			3 perangkat daerah	550.000.000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kota Dumai			10 perangkat daerah	250.000.000	APBD			10 perangkat daerah	500.000.000
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kota Dumai			3 perangkat daerah	300.000.000	APBD			3 perangkat daerah	600.000.000
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kota Dumai			2 kegiatan	250.000.000	APBD			2 kegiatan	600.000.000



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB V
BAB V

PENUTUP
PENUTUP

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai. Dokumen Renja tahun 2024 ini disusun bersamaan dengan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 pasca disyahrkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Menteri Dalam Negeri, maupun Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 setelah dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2023. Sumber pendanaan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2024 bersumber dari APBD.

Dokumen Renja ini disusun mempedomani dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dan memperhatikan hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2022 untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dokumen Renja ini mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 Wali Kota Dumai yang merupakan tahun ketiga pada RPJMD Kota Dumai perodesasi 2021-2026. Tahun 2024 merupakan “Tahap Penguatan” pada RPJMD 2021-2026 dengan Tema Pembangunan “Memperkuat Instrumen Pendukung yang Kondusif Untuk Memantapkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”. Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, diantaranya:

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan;
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pelaksanaan prioritas kelima pembangunan Kota Dumai Tahun 2024 “Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, khususnya pada strategi “Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah”, dengan arah kebijakan “Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal”. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, telah direncanakan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 3 dan Bab 4 dokumen Renja ini, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pelaksanaannya lebih diutamakan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai, pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Kota Dumai, serta pencapaian prioritas nasional.

Tata cara penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab II Bagian Ketujuh “Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah”.

Setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Inspektur Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.


Dumai, 14 Juli 2023
Drs. RIKIDWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2023.
- (4) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2024; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

- (1) Penjabaran RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 28 SERIE

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT KOTA DUMAI TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						24.298.360.182,00						25.697.201.038,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						24.298.360.182,00							25.697.201.038,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan	-			100 %	20.110.008.670,00						-	18.545.090.196,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	460.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	-			1 Laporan	15.125.040.670,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	12.468.890.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	15.055.040.670,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		12.318.890.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			1 Laporan	300.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	-			35 Orang	600.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		100.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Laporan	1.338.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.823.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		368.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan	-			1 Unit	1.375.208.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.075.208.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	125.208.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		125.208.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan	-			2 Laporan	418.600.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	547.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	378.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		447.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara	-			59 Unit	493.160.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	-	1.130.992.196,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	249.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT		401.600.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				40 Laporan	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		405.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	420.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			19 Laporan	718.351.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	380.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				18 Laporan	338.351.512,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	100%			100 %	1.250.000.000,00						100%	2.900.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun</i>	-			1 Rekomendasi	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	650.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		300.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi</i>	-			22 Perangkat Daerah	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	-	2.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				10 perangkat daerah	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				10 perangkat daerah	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				3 Kegiatan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan 05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		600.000.000,00	INSPEKTORAT		
	J U M L A H							24.298.360.182,00								25.697.201.038,00		